

1. Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada Daerah Provinsi
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
 2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan
 4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber data dan ekosistemnya
 7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat hutan

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
9. Pelaksanaan Cabang Dinas
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
11. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama Tujuan : Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan (IKU TUJUAN)

Uraian / Penjelasan Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	IKU Tujuan : Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan	Indikator 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	(%)	Definisi Operasional Indikator IKU : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan adalah persentase perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sub sektor kehutanan dalam suatu periode waktu tertentu (biasanya tahunan) dibandingkan dengan periode sebelumnya. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan kehutanan seperti: <ul style="list-style-type: none">• Penebangan kayu (HTI / Hutan Alam)• Produksi hasil hutan non-kayu (getah, rotan, madu, dll.) Rumus /Formulasi Perhitungan :

				<p style="text-align: center;">Rumus Umum Laju Pertumbuhan Ekonomi:</p> $\text{Laju Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{PDRB Tahun Ini} - \text{PDRB Tahun Lalu}}{\text{PDRB Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$ <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
		<p>Indikator 2 : Persentase Tutupan Lahan</p>	(%)	<p>Definisi Operasional : Persentase tutupan lahan adalah proporsi luas wilayah daratan yang tertutup oleh vegetasi alami atau buatan, seperti hutan, semak belukar, perkebunan, sawah, dan padang rumput, dibandingkan dengan total luas daratan wilayah administratif tertentu yang dinyatakan dalam persen (%).</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Persentase Tutupan Lahan} = \left(\frac{\text{Luas Lahan Tertutup Vegetasi}}{\text{Total Luas Daratan}} \right) \times 100\%$ <p>Sumber Data : Peta Tutupan Lahan Kementerian Kehutanan</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
		<p>Indikator 3: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan</p>	(%)	<p>Definisi Operasional : Persentase penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (AFOLU – Agriculture, Forestry and Other Land Use) adalah ukuran penurunan emisi gas rumah kaca (dalam ton CO₂e) yang dihasilkan dari aktivitas deforestasi, degradasi hutan, kebakaran lahan, dan perubahan penggunaan lahan, dibandingkan dengan tahun dasar (baseline), yang dinyatakan dalam bentuk persentase.</p> <p>Indikator ini menunjukkan efektivitas upaya pengurangan emisi melalui perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, pencegahan kebakaran hutan/lahan,</p>

		lahan (%)		<p>dan pengelolaan lahan berkelanjutan.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Persentase Penurunan Emisi} = \left(\frac{\text{Emisi Baseline} - \text{Emisi Tahun Berjalan}}{\text{Emisi Baseline}} \right) \times 100\%$ <p>Sumber Data : Data pendukung: Peta Citra satelit, Peta tutupan lahan, aktivitas kebakaran hutan dan Lahan, aktifitas pembukaan lahan</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
S.1.1	IKU Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Indikator sasaran 1 : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	(%)	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto dari sektor kehutanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah (nasional atau daerah) dalam periode tertentu.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :</p> $= \frac{\text{PDRB Sektor Kehutanan}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100$ <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB Sektor kehutanan berdasarkan perhitungan Realisasi Produksi kayu x harga berlaku - PDRB Provinsi = Data Badan Pusat Statistik <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>

S.1.2	<p>IKU Sasaran : Meningkatnya pengelolaan hutan</p>	<p>Indikator sasaran 2 : Meningkatnya tutupan lahan disekitar DAS</p>	(Ha)	<p>Definisi Operasional : Kenaikan tutupan lahan yang berada di kawasan sekitar Daerah Aliran Sungai. Indikator ini merefleksikan pemulihan atau perbaikan kondisi lingkungan, khususnya untuk menjaga fungsi hidrologis DAS seperti mencegah erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : <i>Jumlah Luas Areal Penanaman di sekitar DAS</i></p> <p>Sumber Data : Peta Tutupan Lahan Kementerian Kehutanan</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
S.1.3	<p>IKU Sasaran : Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan</p>	<p>Indikator sasaran 3 : Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual</p>	(BaU) (juta ton CO ₂ e)	<p>Definisi Operasional : Penurunan emisi GRK sektor kehutanan dari skenario Business as Usual (BaU) adalah selisih antara jumlah emisi yang diperkirakan akan terjadi tanpa intervensi kebijakan (BaU) dengan jumlah emisi aktual atau proyeksi dengan intervensi kebijakan dan program mitigasi. Nilai ini dihitung dalam satuan juta ton setara karbon dioksida (CO₂e).</p> <p>Indikator ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor kehutanan dalam pengurangan emisi GRK melalui berbagai upaya seperti perlindungan hutan, reforestasi, pencegahan kebakaran, restorasi gambut, dan implementasi REDD+.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : Penurunan Emisi GRK = Emisi BaU – Emisi Aktual/Mitigasi</p> <p>Sumber Data : Data pendukung: Peta Citra satelit, Peta tutupan lahan, aktivitas kebakaran hutan dan Lahan, aktifitas pembukaan lahan</p>

				Tipe Indikator : -Positif / Negatif
S.1.4	IKU Sasaran : Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	Indikator sasaran 4 1. Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Indeks	Definisi Operasional : ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. IKM dihitung berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap beberapa unsur pelayanan secara terstruktur, dan dinyatakan dalam bentuk skor rata-rata pada skala tertentu Rumus /Formulasi Perhitungan : $IKM = \frac{\text{Total Nilai Unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur} \times \text{Jumlah Responden}} \times 25$ Skor setiap unsur dinilai dalam skala 1–4, lalu dikonversi ke skala 25–100 <i>(Sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017)</i> Sumber Data : Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tipe Indikator : -Positif / Negatif
		2. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akip	Definisi Operasional : Ukuran kinerja instansi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh , mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai ini menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah bertanggung jawab atas hasil (outcome) dari penggunaan anggaran dan sumber daya yang dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Rumus /Formulasi Perhitungan : Nilai akuntabilitas ini diberikan dalam bentuk angka kuantitatif (skor 0–100) dan predikat kualitatif (A, BB, B, CC, C) berdasarkan hasil evaluasi Sistem

				<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Sumber Data : Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim</p> <p>Tipe Indikator : -Positif / Negatif</p>
--	--	--	--	---

Ket.

1. Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya diambil berdasarkan yang tertuang dalam ranwal Renstra 2025 – 2029.
2. Definisi Operasional : Definisi yang menjelaskan secara lengkap terkait Indikator tujuan / sasaran.
3. Rumus / Formulasi Perhitungan : Cara menghitung capaian dari Indikator tujuan / sasaran.
4. Sumber data : Instansi / Perangkat Daerah yang melakukan perhitungan data capaian Indikator.
5. Tipe Indikator :
 - **Positif** : Capaian makin besar makin baik.
 - **Negatif** : Capaian makin kecil makin baik.



Kepala,

H. Joko Istanto, S.P., M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197508072000031003